

BIOGRAFI PAKU BUWANA X:
Studi Gerakan Islam dan Kebangsaan di Keraton Surakarta

Oleh:

Hermanu Joebagio

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gerakan Islam dan kebangsaan di Keraton Surakarta. Permasalahan penelitian meliputi: (1) alasan-alasan yang mendorong Paku Buwana (PB) X melakukan gerakan Islam dan kebangsaan; (2) hubungan antara gerakan politik yang dilakukan PB X, tumbuhnya madrasah dan sekolah umum di keraton, dan pergerakan kebangsaan di Surakarta; serta (3) reaksi Belanda terhadap gerakan politik PB X. Persoalan ini penting untuk menjelaskan gerakan Islam dan kebangsaan di keraton yang didukung oleh elit agama dan pengusaha Muslim Laweyan. Sinergi antar mereka mendorong tumbuhnya 'politik lokal' di Surakarta

Metode yang digunakan adalah metode sejarah meliputi heuristik, kritik ekstern dan intern, interpretasi, perumusan fakta, dan penyajian pemikiran dalam penulisan sejarah. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder, sedangkan proses rekonstruksi mempertimbangkan segi diakronik (kesinambungan) dan sinkronik (perubahan). Pendekatan teori yang digunakan adalah teori partisipasi yang berfungsi memacu interaksi antar warga masyarakat (civic engagement) dan memacu keterlibatan warga masyarakat dalam bidang politik (political engagement). Dua aspek tersebut dipandang sebagai usaha meraih kesepadanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan politik yang dilancarkan PB X adalah reaksi terhadap korte verklaring 1893, kebijakan politik etis, dan Undang-Undang Desentralisasi 1903. Gerakan yang dilancarkan PB X dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu bidang pendidikan dan pemberdayaan. Madrasah (1905) dan sekolah umum (1914) merupakan usaha Sunan untuk memperkuat intelektualitas dan memacu tumbuhnya identitas Islam. Intelektualitas dan identitas adalah faktor struktur peluang politik. Sementara itu pendirian Bank Bondoloemakso, pasar, jalan dan jembatan, Rumah Sakit Kadipolo, Rumah Singgah Wangkoeng untuk buruh migran, ruang untuk diskusi (Paheman Radya Pustaka) dan hiburan (Kebon Rodjo) merupakan faktor struktur peluang ekonomi. Kedua struktur peluang (politik dan ekonomi) memacu bangkitnya gerakan Islam dan kebangsaan di Surakarta. Dukungan PB X terhadap Sarekat Islam (SI) dan Boedi Oetomo (BO) yang dikampanyekan melalui perjalanan incognito memacu jumlah anggota SI berlipat ganda. Dukungan politik mengindikasikan telah terjadi perubahan paradigma politik di keraton, yakni dari perspektif politik tradisional menuju politik partisipasi massa. Tindakan Sunan berseberangan dengan politik beamtenstaat yang diberlakukan Belanda. Kebijakan di atas tidak dilanjutkan oleh PB XI dan PB XII.

Sumbangan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa gerakan kebangsaan adalah peran seluruh komponen bangsa, baik yang berpandangan non-kooperatif maupun kooperatif. Meskipun gerakan di keraton bersifat kooperatif, tetapi dinamika politik tersebut mendukung gerakan non-kooperatif, sehingga tindakan-tindakan politik yang mereka lakukan adalah memberi dukungan terhadap perjuangan kebangsaan.

Penelitian disertasi ditujukan untuk mengungkap peran Paku Buwana X dalam gerakan Islam dan kebangsaan. Landasan utama untuk merekonstruksinya tidak hanya dilihat dari segi tindakan politik yang dilakukan pada tahun 1900 hingga 1939, tetapi perlu menganalisis secara tajam pemikiran Sunan berkenaan dengan kekisruhan politik pada masa penguasa sebelumnya, dan intervensi Belanda terhadap kehidupan sosial-budaya, sosial-ekonomi, dan sosial-politik Kasunanan. Melalui aspek-aspek tersebut dapat direkonstruksi tindakan yang berkaitan dengan gerakan Islam dan kebangsaan. Inti rekonstruksi terletak pada kesadarannya terhadap: (1) dinamika politik penguasa sebelumnya yang belum tuntas membangun politik kenegaraan, (2) tindakan Sunan dalam menghadapi tekanan kolonial, serta meletakkan landasan pemberdayaan diri, (3) membangun gerakan Islam dan kebangsaan di Surakarta, dan (4) konstruksi reaksi Belanda terhadap perubahan politik di Keraton Surakarta.

I. Dinamika Membangun Politik Kenegaraan

Hampir seluruh kerajaan tradisional di Nusantara belum mampu meletakkan landasan kehidupan politik kerajaan. Hal ini menjadi bahan renungan PB X, yang terklasifikasi dalam tiga pokok persoalan, yakni: (1) Sistem politik yang dianut yang tidak mengakomodasi potensi-potensi kelompok sosial dan kelompok politik. (2) Kejenuhan politik perkawinan yang menumbuhkan kerumitan jaringan hubungan keluarga dan jaringan kepentingan politik. (3) Diberlakukan birokrasi *binnenlandsbestuur* dan *inlandschbestuur* yang mengakibatkan terputusnya jaringan loyalitas antara para bupati di pesisir maupun mancanegara terhadap eksistensi kekuasaan raja.

A. Sistem Politik di Keraton Surakarta

Pada dasarnya, sistem politik yang dianut di Keraton Surakarta mengikuti pola Sultan Agung, yakni keraton sebagai agen islamisasi di Jawa, dan Islam adalah wadah rekonsiliasi budaya Jawa. Dua kebijakan itu bermakna: (1) keraton adalah pusat pengkajian ilmu agama Islam. Melalui kebijakan ini berakibat munculnya dukungan ulama kepada raja sebagai wujud hidup berdampingan. (2) Islam merupakan “alat politik” untuk mengatasi persoalan-persoalan sosio-budaya dan sosio-ekonomi yang sedang dihadapi Sultan Agung. Dengan landasan ini Sultan Agung berharap mendapat legitimasi politik dari basis massa yang lebih luas. (3) Islam yang dianut cenderung bercorak sinkretik, sehingga Islamisasi di pedalaman Jawa bercorak sama. Hal ini konsekuensi dari masih bertahannya tradisi Hindu-Buddha.

Dengan landasan di atas, maka kelompok sosial yang mampu memasuki ranah politik hanya orang-orang yang dekat dengan istana, yakni: aristokrat, ulama dan pujangga. Sementara itu pelaku ekonomi ditempatkan pada posisi “periferal”. Dalam kasus di Premulung, yakni ketika PB II melarikan diri ke Ponorogo dan tertahan di Premulung, dia berinisiatif meminta bantuan alat transportasi ‘kuda’ kepada pengusaha Laweyan. Permintaan raja cenderung ‘diacuhkan’. Gejala ini menunjukkan adanya apatisme ‘pengusaha Muslim’ terhadap penguasa. Keteracuhan kelompok sosial itu konsekuensi dari:

- (1) Tiadanya perhatian raja terhadap pelaku ekonomi, yang pada dasarnya mempunyai andil besar dalam membangun perekonomian negara, dan menjaga stabilitas politik serta keamanan negara. Menurut Arbi Sanit terwujudnya stabilitas politik ditentukan oleh variabel yang saling berkaitan, yaitu; (a) pembangunan ekonomi, (b) adanya lembaga politik yang mengakomodasi seluruh kepentingan warga masyarakat, dan (c) dukungan elit politik maupun rakyat. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaku ekonomi tidak terakomodasi dalam sistem politik kerajaan. Seluruh aspek kekuasaan

(budaya, ekonomi, politik, dan sosial) tersentralisasi di tangan penguasa. Raja ataupun bupati secara simbolik tidak membutuhkan kelompok social pelaku ekonomi, karena mereka tidak memiliki basis massa. Sebaliknya pada awal abad XX pelaku ekonomi (pengusaha Laweyan) dan golongan intelektual menjadi motor penggerak gerakan kebangsaan. Peran tersebut muncul akibat meluasnya peminggiran dan diskriminasi yang mereka hadapi, sehingga memacu kesadaran organik. Dengan bekal jejaring ekonomi dan jejaring dengan kaum intelektual, maka gerakan politik yang dibentuk makin meluas, beragam dan fungsional.

- (2) Doktrin Islam yang dipahami masyarakat (termasuk pelaku ekonomi) bahwa birokrat dan rakyat berkedudukan sejajar, namun kenyataan sosial menunjukkan terjaganya pelapisan-pelapisan sosial yang diskriminatif.

B. Jenuhnya Jaringan Hubungan Keluarga

Politik perkawinan merupakan alat untuk menyatukan aristokrat dalam satu lingkup keluarga besar. Politik perkawinan antar keluarga tidak terbatas antar pejabat negara baik di pusat maupun di daerah, tetapi juga perkawinan antara keluarga pejabat dan pemberontak, bahkan dengan keluarga ulama yang bertindak sebagai oposisi. Politik perkawinan adalah strategi penguasa untuk meredam gejolak politik atau mendamaikan antar faksi yang sudah lama mengalami keretakan. Mengingat politik perkawinan menghasilkan kearistokratan yang bertingkat dan berlapis-lapis, maka mengakibatkan kejenuhan. Kejenuhan itu berpeluang disusupi pengaruh dari luar, yakni kompeni.

Penyusupan kompeni memacu timbulnya konflik antar elit politik. Dalam pemikiran Jawa, politik perkawinan merupakan alat jejaring ikatan keluarga untuk memperkuat bangunan patron-client, serta alat kontrol terhadap anggota keluarga. Praktek itu tidak efektif dalam membangun jaringan patron-client, karena masing-masing keturunan berkepentingan pada lingkaran kekuasaan. Sementara itu, keturunan raja yang berjumlah besar tentu sulit untuk dikontrol. Dalam hubungan dengan suksesi masing-masing keturunan membangun afiliasi dengan kekuatan politik lain yang saling berbeda. Afiliasi aristokrat dan kompeni dalam hubungannya dengan suksesi akan memperluas permusuhan terbuka antar elit politik. Mereka tidak memiliki konsensus dalam meletakkan landasan sistem politik negara, dan hal ini menjadi salah satu faktor dominan timbulnya kemerosotan politik abad XVI hingga awal XIX. Faktor lain yang mempercepat kemerosotan politik adalah: (1) Keberadaan pasukan militer di bawah kekuasaan para bupati mancanegara. (2) Secara sembunyi-sembunyi pejabat kompeni mendukung adanya intrik, faksionalisme, dan provokasi di lingkungan istana. (3) Rendahnya kemampuan para pejabat di pusat maupun di daerah dalam mengelola sistem administrasi pemerintahan. (4) tidak efektifnya perkawinan sebagai landasan ikatan politik.

Hadirnya kompeni di kerajaan tradisional, meski berada di pinggiran, dan belum sampai pada titik permusuhan kultural, tetapi pengaruh kompeni tersebut telah menjadi faktor perusak terhadap kesatuan politik kerajaan tradisional. Pada dasarnya kekuatan kompeni sangat terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan yang dimiliki raja.

Tindakan kompeni selain memperlemah kedudukan raja juga mengganggu sistem politik, karena sistem politik kerajaan tradisional dibangun dari kumpulan hubungan patron dan client. Setiap gangguan terhadap sistem politik sekecil apapun dapat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi dan sosial politik kasultanan. Pada sisi lain, kumpulan patron dan client sangat terbatas, terdiri dari kelompok politik aristokrat dalam istana, aristokrat di luar istana, ulama istana, dan ulama di luar istana. Tidak masuknya pelaku ekonomi dalam kumpulan patron dan client istana, berakibat positif terhadap perkembangan Islam. Pelaku ekonomi cenderung dekat dengan kiai, dan turut membesarkan lembaga pendidikan Islam, yakni pesantren.

Pada umumnya aristokrat istana yang berseberangan dengan kebijakan raja ataupun yang bertindak sebagai oposisi cenderung 'disantrikan', dan hidup dalam lingkungan pesantren. Aristokrat yang disantrikan itu yang paling gigih melancarkan gerakan Islam, baik secara periferal maupun semi-periferal. Berpijak pada analisis konflik Ralf Dahrendorf bahwa dalam masyarakat terdapat peran-peran otoritas yang sifatnya tidak konstan tetapi peran itu cenderung menyatakan diri sebagai superordinasi dan subordinasi. Sifat yang demikian itu maka dalam masyarakat terdapat asosiasi yang dikontrol oleh otoritas yang mempunyai kepentingan tertentu. Teori Ralf Dahrendorf dihubungkan dengan gerakan Islam di Jawa menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin atau petani diasumsikan tidak memegang kendali gerakan Islam, karena kelompok masyarakat itu bersikap apatis terhadap kenyataan sosial dan ekonomi yang sedang mereka dihadapi. Mobilitas vertikal diri mereka (kaum tani) dapat terangkat oleh dinamika politik yang dilakukan kelompok elit yang memiliki status sosial ekonomi baik, atau dalam istilah Dahrendorf adalah kelompok yang memiliki peran otoritas.

Uraian di atas menunjukkan mereka yang mempunyai peran otoritas (aristokrat yang tersingkir dari sistem politik Hindia Belanda, pelaku ekonomi, dan kiai) membangun jaringan dan menjadi satu kekuatan politik. Pada dasawarsa pertama abad XX model jejaring politik seperti di atas digunakan PB X sebagai alat untuk mengembangkan civic engagement dan political engagement khususnya dalam hubungannya menghadapi kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang berkembang abad itu. Rendahnya keterlibatan politik berakibat tidak adanya hubungan simbiotik antara warganegara dan negara, karena itu elit politik mulai menggali landasan intelektual sebagai dasar etika dan moral dalam konteks pencarian hubungan antara warganegara dan negara. Penemuan pemikiran yang mereka peroleh menunjukkan tidak terbentuk struktur hubungan yang adil dan sejajar antara warganegara dan pemerintah Belanda. Karena itu pentingnya bagi warganegara membangun kekuatan politik melalui organisasi sosial maupun politik untuk menghadapi tekanan kolonial.

C. Munculnya Birokrasi Yang Menekan

Pasca Perang Jawa tahun 1830 pemerintah Belanda membentuk birokrasi *Binnenlandschbestuur* dan *Inlandschbestuur*, yang berfungsi memperkuat kedudukan bupati di pasisir dan mancanegara. Kehadiran dua birokrasi baru mengakibatkan putusannya ikatan loyalitas antara raja dan bupati pasisir maupun bupati mancanegara. Denys Lombard melihat ada empat faktor yang mendorong putusannya ikatan loyalitas itu, yaitu: (1) terbentuknya priyayi otonom sebagai bupati di daerah, baik pasisir maupun mancanegara; (2) adanya strategi perkawinan antar keluarga bupati, dan tidak dengan keluarga istana; (3) priyayi otonom terbebas dari tugas menyediakan pasukan militer untuk kepentingan kerajaan; dan (4) bupati di daerah sangat tergantung pada sumber daya lokal sebagai landasan basis legitimasi politik mereka. Terputusnya ikatan loyalitas justru tidak dirasakan oleh para raja tradisional, karena raja tetap berkuasa dalam pemerintahan, dan diizinkan untuk memiliki pasukan militer meskipun bersifat simbolis. Perubahan ini berakibat munculnya sebutan 'bupati raja'.

Umumnya birokrasi pangreh praja (*Inlandschbestuur*) dikelilingi dengan relasi juru tulis, selir, pelayan, magang dan opas (satuan pengamanan). Sementara itu sikap politik bupati sangat tergantung pada pemerintah Batavia, dan mereka menekan rakyat selama periode tanam paksa maupun periode perkebunan swasta. Kenyataan ini mendorong ulama menarik legitimasi politik terhadap kekuasaan bupati. Penarikan legitimasi politik oleh ulama terhadap bupati dilatarbelakangi: (1) Meluasnya tindakan tidak terpuji oleh para birokrat kabupaten yang meminta bagian dari produksi tanam paksa, bahkan pejabat Belanda juga menuntut pembagian yang sama; (2) Peran bupati sebagai pengawas tanam paksa cenderung mengeksploitasi petani. Tindakan mereka dalam pemikiran ulama adalah tidak

dibenarkan, dan mereka merupakan pelayan pemerintah kafir. Pada sisi lain, kekuasaan raja Jawa dilucuti, dan akibatnya raja membangun kembali komunikasi dan jejaring politik dengan ulama beserta basis massanya sebagai kekuatan politik, meskipun tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Hadirnya birokrasi *Binnenlandschbestuur* dan *Inlandschbestuur* adalah bentuk dualisme birokrasi kolonial. Dualisme birokrasi yang dibentuk pemerintah Belanda cenderung menindas rakyat, dan dualisme birokrasi itu berlangsung hingga tahun 1942. Bahkan Douwes Dekker dalam Max Havelaar [1860] sangat menentang kebijakan politik kolonial yang dipandang melampaui batas kemanusiaan. Max Havelaar selanjutnya menjadi simbol perlawanan anti kolonial Barat. Pada mulanya keberadaan *Binnenlandschbestuur* bertujuan membasmi feodalisme, tetapi justru dipraktekkan sendiri oleh birokrasi itu. Oleh karena itu keberadaan *Binnenlandschbestuur* sama dengan konstruk birokrasi masa VOC, yaitu adanya aliansi antara VOC dan kerajaan tradisional. Aliansi ini bingkai kerja, yang terurai sebagai berikut: (1) birokrasi *Binnenlandschbestuur* menjamin stabilitas keamanan; (2) birokrasi *Inlandschbestuur* memberi kesempatan birokrasi *Binnenlandschbestuur* untuk melakukan monopoli agraria; dan (3) birokrasi *Inlandschbestuur* bertugas mengawasi produksi pertanian yang dijalankan oleh petani. Menurut Jean Gelman Taylor, dualisme birokrasi muncul akibat ketidakmampuan untuk mengendalikan intervensi kolonial. Mereka juga tidak mampu membangun jaringan loyalitas dan mengendalikan bawahannya, baik kepada bupati maupun patih yang berada di lingkungan istana.

Jaringan perkawinan dan binanegara tidak cukup kuat untuk menciptakan jaringan loyalitas permanen. Pasca Perang Jawa 1830 bupati dan patih berada dalam bayang-bayang pemerintah Belanda. Lemahnya jaringan loyalitas antara raja dan bupati berakibat negatif, ketika raja berhadapan dengan intervensi kolonial yang sangat kuat intensitasnya. Kondisi yang dilematis ini mendorong patih dan bupati memilih melepaskan diri dari ikatan loyalitas dengan kerajaan tradisional, dan beralih dalam bayang-bayang kolonial. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakmampuan menemukan cara terbaik membangun jaringan loyalitas, padahal semestinya mampu menghadapi kekuatan asing. Di sisi lain, tidak ada koordinasi militer baik di pusat maupun di daerah, hal ini memberi celah kolonial untuk melakukan politik 'pecah belah'.

II. Paku Buwana X dalam Tekanan dan Tantangan

A. BRMG Sayidin Malikul Kusno Bertahta

Bendara Raden Mas Gusti (BRMG) Sayidin Malikul Kusno dilahirkan pada hari Kamis Legi, 29 November 1866 adalah putera PB IX dengan Bendara Raden Ajeng (BRA) Koestijah (Kanjeng Ratu Paku Buwana). Pada usia tiga tahun diangkat menjadi putera mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPA) Amangku-nagara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram V, dan naik tahta pada tanggal 30 Maret 1893–20 Februari 1939. PB X memerintah selama 46 tahun, meski dia ditekan secara ekonomi dan politik. Seluruh wilayah kekuasaannya diambil alih Belanda, dan Kuntowijoyo menyebut 'tertawan di keratonnya sendiri'. Tertawannya Sunan akibat dari diberlakukan Undang-Undang Desentralisasi 1903, reorganisasi agraria dan administrasi pemerintahan, reorganisasi peradilan, serta diberlakukan *beamtenstaat* yang melarang warga masyarakat melakukan kegiatan politik praktis. Namun, Sunan mampu menghadapi dengan memacu mobilitas masyarakat melalui kebijakan mendirikan:

- (1) Madrasah Mamba'ul Ulum, 1905.
- (2) HIS Kasatryan, 1914.
- (3) HIS Parmadi Putri dan Taman Kanak-Kanak Parmadi Siwi, 1914.
- (4) Mendirikan rijksstudiefonds.

- (5) Bank Bandhalumaksa, 1918.
- (6) Memfasilitasi Kongres Budaya di Surakarta, 1918.
- (7) Pasar Gedhe Hardjonegoro, 1930.
- (8) Jembatan Jurug, 1913.
- (9) Jembatan Bacem, 1915.
- (10) Jembatan Mojo, 1916.
- (11) Rumah Sakit Panti Rogo dan Apotik Pantihusada, 1918.
- (12) Paheman Radya Pustaka, 1910.
- (13) Kebon Rojo (Sriwedari), 1902.
- (14) Membangun rumah singgah buruh migran 'Wangkoeng'.
- (15) Mendukung partai politik SI dan BO.
- (16) Memberi subsidi kepada perguruan Muhammadiyah.
- (17) Merenovasi Masjid di bawah yurisdiksi Keraton Surakarta.
- (18) Reformasi birokrasi untuk pemberdayaan, misalnya mendirikan lembaga *accountantie kantoor*, *bandha pasinaon*, *rijksstudiefond*, *kridha nirmolo*, dan *bale agung*.
- (19) Mendirikan lembaga pedalangan, 1923.
- (20) Mendirikan lembaga pertukangan, 1923
- (21) Bangsal Sewayana di Sitihinggil Lor, 1913.
- (22) Menambah bangunan Bangsal Smarakata dan Mercukunda, 1919.
- (23) Sasana Dayinta, 1915.
- (24) Memperbaharui Sasana Handrawina, 1919.
- (25) Pagelaran Sasana Sumewa, 1913.
- (26) Masjid Pudyasana, 1912.
- (27) Gapura Gladag, 1930.
- (28) Keraton Kilen, 1925. Sementara itu sumber dari GPH Puger pada tahun 1904.
- (29) Miniatur gunung yang disebut Argopura, 1911.
- (30) Mendirikan Tugu Peringatan, 1939.

Tekanan ekonomi, politik dan sosial yang kuat menumbuhkan tantangan dalam diri pribadi Sunan. Dia berhasil melepaskan diri dari kepungan traumatis dan menampilkan diri sebagai agen perubahan. Analisis melalui pemikiran Sartono Kartodirdjo mengenai pembagian aristokrasi protagonis dan status quo, teori strukturasi Anthony Giddens dan model komunikasi Robert Dahl, mengisyaratkan bahwa Sunan memerankan diri sebagai agen perubahan, bahkan dengan kebijakan yang ditempuh saat itu (*decision making events*) dapat membangun komunikasi dan mempengaruhi kelompok sosial maupun politik untuk berafiliasi dan berorientasi kepadanya (Keraton Surakarta).

Walaupun kebijakan pemberdayaan yang ditempuh terbatas, tetapi berhasil memerankan diri sebagai agen (aktor) secara otonom. Hal ini akibat adanya kesadaran praktis bahwa kebijakan yang ditempuh adalah tindakan benar, dan proses pemberdayaan dilakukan tanpa melalui 'propaganda politik', tetapi diwujudkan secara langsung. Pemberdayaan ditujukan untuk: (1) Penataan struktur sosial. Penataan struktur sosial lebih utama dari pada memperluas gerakan protes. Penataan struktur diwujudkan pendirian madrasah dan sekolah umum yang dipandang akan memacu intelektualitas dan kegiatan ekonomi, serta menghasilkan elit yang mampu menata tatanan politik 'baru'. Kaum intelektual diasumsikan piawai dalam organisator politik. (2) Pemberdayaan masyarakat sengaja tidak dipropagandakan untuk menghindari polemik dengan tokoh garis keras (*Insulinde/NIP*), karena mereka berseberangan dengan pemikiran PB X.

Kebijakan membangun infrastruktur pendidikan dan ekonomi memacu terbentuk komunikasi antar elit di Surakarta, baik elit istana, elit agama, maupun intelektual. Bahkan ketika mengirim utusan berkunjung di Banten, 1902, Sunan menitipkan pesan kepada Tirtoadhisoejo. Pesan ditindaklanjuti Tirto dengan berbicara di depan Perkumpulan Abiproyo dan pengusaha Laweyan. Mereka

setuju memberdayakan ekonomi umat Muslim. Dorongan Sunan memacu tumbuhnya dinamika politik lokal dalam perspektif teori strukturasi, dia (PB X) memerankan diri sebagai agen untuk memacu perubahan, baik perubahan politik di keraton maupun penataan struktur sosial. Keberanian memerankan diri berimplikasi pada pengabaian terhadap status dirinya sebagai raja, bahkan bebas melakukan perjalanan incognito.

B. Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903, Reorganisasi Agraria dan Administrasi Pemerintahan Yang Menekan

Undang-Undang Desentralisasi 1903 adalah kelanjutan dari Undang-undang Agraria 1870. Dasar pemikiran undang-undang itu adalah untuk mewujudkan tuntutan pengusaha Belanda dalam menswastakan bidang perkebunan dan perdagangan, serta menuntut hak berbicara dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Mereka berpendapat pemerintah kolonial tidak mampu menyelesaikan permasalahan di daerah dengan sistem sentralistis. Untuk itu perlu dibentuk pemerintah lokal, dengan maksud pribumi dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Implikasi dari tuntutan itu adalah reorganisasi di seluruh wilayah Hindia Belanda, baik sistem agraria maupun administrasi pemerintahan. Inti reorganisasi adalah: (1) wilayah Hindia Belanda dibagi dalam satuan-satuan daerah setingkat karesidenan, kabupaten, dan desa; (2) pemerintah daerah dijabat oleh pejabat tinggi Belanda, dan pejabat pribumi; (3) Gubernur Jenderal berhak menetapkan hubungan kekuasaan antar pejabat tinggi, pribumi, dan pihak-pihak lain; (4) kekuasaan sipil merupakan kekuasaan tertinggi; (5) menata tanah milik keraton sesuai UUD 1903, yang diefisiensikan menjadi perkebunan swasta.

Kebijakan di atas merugikan keraton dan petani, karena wilayah keraton yang sebagian besar untuk pertanian dirubah menjadi perkebunan tanaman ekspor. Sementara itu pemerintah daerah wajib mengatur sistem administrasi pemerintahan, menyusun dan mencari anggaran belanja sendiri, serta mempertanggungjawabkan di dewan daerah (*locale raden*). Akibatnya pemerintah daerah menyewakan lahan pertanian kepada pengusaha Belanda untuk mengisi kas daerah. Keuntungan yang diperoleh dari pemberlakuan UUD 1903 adalah Surakarta dan Yogyakarta daerah otonom. Terhadap daerah otonom diizinkan untuk mendirikan sekolah swasta beserta pengajaran agama Islam, bahkan otonomi dipersepsikan elit politik boleh mendirikan organisasi sosial dan politik.

Akibat negatif reorganisasi agraria dan administrasi pemerintahan adalah membagi daerah hingga tingkat desa adalah: (1) pengetatan sistem administrasi, (2) pengawasan ketat terhadap aktivitas masyarakat pada tiap-tiap satuan daerah. Sistem pengawasan adalah awal terbentuknya *beamtenstaat*, yang didefinisikan Ruth McVey sebagai 'the state as efficient bureaucratic machine'. Maksudnya, negara kolonial adalah mesin birokrasi. Dalam struktur ini, negara diurusi oleh para pegawai, baik birokrasi *Binnenlandsbestuur* maupun *Inlandschbestuur*. Meskipun birokrasi bersifat rasional, tetapi dinas polisi rahasia sangat berperan memapankan birokrasi, bahkan dinas polisi rahasia sering melakukan isolasi terhadap individu dan kelompok masyarakat yang melakukan gerakan protes. Karena itu *beamtenstaat* disebut pula negara a politik.

C. Reorganisasi Peradilan

Selain reorganisasi agraria dan administrasi pemerintah, juga dilakukan reorganisasi peradilan, bertujuan menghapus sistem peradilan keraton beserta kitab undang-undang hukum pidana maupun perdatanya, yang tertuang dalam Serat Angger-anggeran Jawi. Keresahan sosial dan gerakan Islam di pedesaan pada dua dasawarsa terakhir abad XIX mengganggu keberlangsungan perkebunan dan perdagangan. Kerusuhan belum mampu di atasi oleh sistem keamanan keraton. Banyak faktor yang melandasinya, yakni: (1) meluasnya kemiskinan; (2) hilangnya kedaulatan penguasa; (3) makin melebar kesenjangan sosial antar kelompok sosial dalam masyarakat.

Lembaga peradilan keraton meliputi Surambi Masjid, Pradata Negri, Pradata Kadipaten, dan Pradata Kabupaten. Sementara itu Surambi Masjid di pusat kerajaan dipertahankan dengan tugas menangani masalah perkawinan, warisan, dan wasiat, sedangkan Surambi Masjid di kabupaten dihapuskan. Pradata Kadipaten dan Pradata Kabupaten diganti lembaga peradilan baru yang dibentuk Belanda, yaitu: Lanraad, Pengadilan Kabupaten, Rol Polisi, Rad Agama, dan Pengadilan Karesidenan. Penghapusan ini konsekuensi logis instabilitas politik dan keamanan.

III. Paku Buwana, Kerabat Keraton dan Kaum Intelektual dalam Pergerakan Kebangsaan

Salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya dinamika politik di Surakarta adalah munculnya pendidikan swasta. Sejak diberlakukan politik etis, keraton mendirikan madrasah dan sekolah umum untuk anak sentana, abdi, dan kawula dalem yang tidak terakomodasi sistem pendidikan kolonial. Makin kuatnya peningkatan intelektualitas anak sentana, abdi, dan kawula dalem adalah indikasi bahwa basis politik berpindah kepada masyarakat, dan tidak bertumpu pada elit tradisional. Perubahan orientasi ini menunjukkan bahwa keraton menerima nilai-nilai kemodernan dan kemanusiaan. Tafsiran nasionalis garis keras yang dipelopori dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, H.M. Misbach dan Mas Marco Kartodikromo menggambarkan bahwa keraton utamakan kepentingan kelompok, dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Kaum nasionalis garis keras sangsi terhadap kemampuan PB X dalam panggung politik Vorstenlanden, karena: (1) PB X tidak memiliki pendidikan formal; (2) orientasi politik yang dianut bersifat etnosentris; dan (3) wawasannya sempit, sehingga tidak mampu membangun komunikasi dan jejaring politik dengan tokoh-tokoh pergerakan.

Tekanan terhadap keraton membangkitkan kesadaran aristokrat protagonis (pro gerakan kebangsaan), di antara mereka tidak mengenyam pendidikan, tetapi mampu membangun kekuatan politik. Abdurrahman Soerjomihardjo (mengutip laporan Residen Yogyakarta) mengemukakan bahwa putera HB VII mendirikan perkumpulan Dhikir Pitoengleksen yang berafiliasi dengan sayap garis keras dari organisasi Muhammadiyah. Kesadaran aristokrat protagonis merupakan cermin munculnya aristokrat berkarakteristik modern, yang memiliki watak dan sifat berbeda dengan priyayi pangreh praja (aristokrat pro status quo). Aristokrat protagonis membangun identitas baru dan melibatkan dalam dinamika politik lokal. Tindakan itu merupakan bentuk mobilitas kelompok yang terpinggirkan secara politis maupun ekonomis.

A. Paku Buwana X dan Boedi Oetomo

Berdirinya Boedi Oetomo (BO) pada Rabu, tanggal 20 Mei 1908, di Weltevreden (Jakarta) merupakan gagasan pelajar School tot Opleiding voor Indische Artsen (STOVIA). Pendirian BO dilandasi pemikiran bahwa pendidikan formal belum dapat dinikmati masyarakat kelas bawah, meskipun dasar kebijakan etis membuka kesempatan bagi priyayi rendahan dan rakyat untuk memasuki dunia pendidikan formal. Pemberlakuan kebijakan etis dilandasi kenyataan bahwa administrasi birokrasi Hindia Belanda mensyaratkan pegawai berpendidikan dan berketerampilan teknis. Sementara itu ketersediaan intelektual untuk mengisi birokrasi administrasi sangat terbatas. Hal ini merupakan akibat dari: (1) anak-anak usia sekolah yang diterima di sekolah pemerintah berasal dari kelompok sosial atas; (2) diskriminasi pendidikan berakibat adanya pembedaan jenis sekolah dan kurikulum pendidikan (ELS, HIS, dan Sekolah Kelas Satu dan Dua); dan (3) biaya sekolah sangat mahal dan tidak terjangkau oleh kelas sosial bawah.

Praktek politik pendidikan itu menimbulkan rasa prihatin pelajar STOVIA, sehingga salah satu tujuan pendirian BO adalah penggalangan bea siswa (studiefonds) untuk membantu pelajar pribumi yang mempunyai kecakapan, tetapi tidak memiliki biaya pendidikan. Pemberian bea siswa diutamakan pada mereka

yang belajar di sekolah sekuler, bukan sekolah Islam (madrasah), tetapi pemikiran pelajar STOVIA belum tentu diterima oleh orang tua siswa yang memegang teguh syariat Islam. Mereka cenderung memilih memasukkan anak-anak mereka pada sekolah Islam, madrasah. Pemberian bea siswa menunjukkan BO organisasi progresif. Artinya, perjuangan BO cenderung diarahkan untuk menata sumber daya pribumi sebelum mereka memasuki dunia politik 'praktis'.

Penataan sumber daya pribumi bergayut sambut dengan tujuan Pakualam Studie Fonds. Karena itu BO didukung penuh oleh keluarga Pakualaman, baik Kongres BO I pada tanggal, 3-5 Oktober 1908, di Yogyakarta, maupun Kongres BO II pada tanggal, 10-11 Oktober 1909. Dukungan penuh keluarga Pakualam karena BO adalah organisasi politik pribumi pertama di Jawa. PB X kurang hangat melihat perkembangan BO di Yogyakarta, meskipun dia bersimpati terhadap pemikiran pelajar STOVIA, terutama mengenai nilai kebebasan, humanis, sekuler, progresif, dan keselarasan hidup. Sikap PB X tidak masuk akal, karena hanya didasari penetapan kantor pusat BO di Yogyakarta. Rupanya citra perselisihan masa lalu teringat di benaknya. Uraian Dwidjosewojo dan Sastrowidjono mengenai peningkatan sumber daya pribumi sebagai kekuatan politik makin mempertajam ketertarikan PB X terhadap BO.

Pemikiran Sastrowidjono menyiratkan: (1) pentingnya self-sufficiency yang diwujutkan dalam kebijakan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi; (2) membangun hubungan dengan pedagang dan pengusaha Muslim; (3) membangun semangat kebangsaan yang mulai memudar. Pemikiran itu ditujukan agar BO menjadi organisasi besar. Suatu organisasi politik tidak menjadi besar dan memperoleh dukungan bila pendukungnya miskin. Berkurangnya kemiskinan akan membentuk kelas menengah mapan, dan memacu kerjasama antar kelompok sosial dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemikiran Sastrowidjono diabaikan, karena pendukung utama BO menolak. Akhirnya, pemikiran Sastrowidjono tidak masuk program kerja BO. Penolakan itu menunjukkan bahwa pemikiran pangreh praja berkarakter 'sektarian' (mengutamakan diri sendiri). Mereka mengendarai dan mengendalikan BO dalam bingkai 'tatanan politik asosiasi'. Bagi PB X mobilitas vertikal adalah faktor penting untuk menumbuhkan kesadaran praktis. Bangkitnya kesadaran memacu rakyat menguasai objek-objek yang berkaitan dengan hajat kehidupan mereka. Untuk mewujudkan dikeluarkan kebijakan perluasan pendidikan dan pengembangan sarana perekonomian rakyat. Tindakan ini akan menambah jumlah kelompok intelektual, pelaku ekonomi, pekerja sosial, dan lain sebagainya. Mereka akan saling terkait, dan keterkaitan itu mendorong munculnya kesadaran praktis. Kesadaran juga menjadi modal dasar 'kesadaran politis', terutama dalam hak menentukan nasib sendiri. Dalam hubungan ini kesadaran elit politik di Surakarta diawali dengan pemikiran etnisitas yang berwujud nasionalisme Jawa, dan selanjutnya menapaki jenjang pemikiran kebangsaan. Fenomena pemikiran ini dapat dilihat dari pertumbuhan organisasi politik di Indonesia, mulai dari berdirinya BO (Jawa), SDI dan SI (Islam) hingga Partai Nasional Indonesia (kebangsaan).

B. Paku Buwana X dan Sarekat Islam

Hubungan PB X dan tokoh SI dapat ditelusuri dari komunikasi politik antara PB X dan RM Tirtoadhisoejo. Proses komunikasi bermula ketika RM Ng. Prodjo Sapoetro diutus mengunjungi Banten, April 1902. Dalam kunjungan itu, Prodjo meminta Tirto sebagai pemandu. Hal ini berkaitan dengan pesan Sunan yang meminta Tirtoadhisoejo untuk mengelola mingguan berkala Bromartani yang sedang menghadapi krisis manajemen. Pada akhir kunjungan Tirtoadhisoejo diberi kenang-kenangan destar dan kain batik. Kenang-kenangan itu secara simbolik bermakna:

- (1) Sunan ingin membangun kerjasama dengan Tirtoadhisoejo untuk meningkatkan kemampuan elit Surakarta dalam mendirikan organisasi sosial

dan politik. Tirtoadhisoeerjo dipersepsikan sebagai sosok berpandangan kuat mengenai pentingnya pemulihan ekonomi dan politik. Visi ekonomi Tirtoadhisoeerjo adalah menegakan dan menghargai potensi diri pelaku ekonomi, baik pengusaha dan pedagang batik, sedangkan visi politiknya adalah menentang tekanan dan hegemoni kolonial.

- (2) Tirtoadhisoeerjo adalah jurnalis tangguh dan berani. Dia mampu membangun opini publik, dan membongkar kebijakan politik kolonial yang merugikan pribumi.
- (3) Kenang-kenangan adalah simbol yang di dalamnya tersirat keinginan memulihkan harga diri dan martabat bangsa dengan memanfaatkan Islam sebagai kekuatan penyangga. Komunikasi ini mengisyaratkan terjadi perubahan orientasi politik di Keraton Surakarta, yakni dari perspektif tradisional menuju politik partisipasi massa.

Sejak tahun 1904 Tirtoadhisoeerjo melakukan perjalanan secara rutin Batavia–Solo dan Bandung–Solo untuk melakukan transaksi batik dengan pengusaha batik Laweyan, dan menjadi distributor mingguan Darmokondo (1904–1939). Selama di Kota Surakarta Tirtoadhisoeerjo menemui elit keraton dan pengusaha batik Laweyan. Sepanjang kegiatan di Surakarta, dia menjalin hubungan dengan Paguyuban Abiproyo (organisasi sosial bangsawan) dan Rekso Roemekso (paguyuban pengusaha batik Surakarta). Dalam pertemuan dengan Paguyuban Abiproyo, dia meminta agar pengusaha dan pedagang batik harus mendapat penghargaan dan perlindungan, bahkan usaha tersebut harus dikembangkan dan dipertahankan.

Pada 1912, diadakan pertemuan antara Tirtoadhisoeerjo dan KH. Samanhoedhi, M. Asmodimedjo, M. Kertotaroeno, M. Sumowerdojo, dan HM. Abdoerradjak. Inti pembicaraan adalah monopoli bahan batik oleh pedagang Tionghoa, serta keinginan untuk mendirikan perhimpunan pengusaha dan pedagang batik. Hasil pertemuan disepakati didirikan SDI di Surakarta yang merupakan cabang SDI Bogor. Pendirian SDI adalah untuk membangun solidaritas umat Islam, serta melindungi pengusaha dan pedagang batik. Menurut Agus Salim, Revolusi Cina 1911 memicu perubahan sikap orang Tionghoa di Hindia Belanda. Orang Tionghoa memandang rendah pengusaha dan pedagang pribumi yang bergerak dalam industri batik. Hal ini memacu ketegangan antar mereka, bahkan orang Tionghoa memandang diri mereka sejajar dengan Belanda, meski sistem diskriminasi sosial tetap diberlakukan Belanda, yaitu sebagai kelompok timur asing. Perubahan menjadi SI adalah strategi untuk meraih basis massa yang lebih luas. Praksis perubahan adalah akibat mendapat izin dari Gubernur Jenderal Idenburg (1909–1916).

Menurut Aqib Suminto perubahan dari SDI menjadi SI karena meningkatnya gerakan radikal di pedesaan, terutama tuntutan perbaikan kesejahteraan hidup buruh perkebunan. Ada beberapa faktor yang memacu gerakan radikal, yakni: (1) kemiskinan struktural di pedesaan yang tidak dapat diatasi dengan kebijakan reorganisasi agraria dan administrasi pemerintah; (2) kuatnya gerakan politik pada dasawarsa abad XX yang beraliran lain, yakni nasionalis, sosialis, dan marxis, yang juga memacu radikalisasi; (3) masing-masing aliran politik bergerak sendiri-sendiri tanpa bersinergi dan berkoordinasi.

Munculnya radikalisme di Surakarta menguntungkan SI, karena jumlah anggota organisasi tersebut bertambah pesat. Keanggotaan SI dapat dipilah dalam lima kelompok, yakni: (1) aristokrat protagonis, (2) pengusaha Muslim, (3) jurnalis, (4) intelektual, dan (5) masyarakat kota maupun pedesaan. Dalam konteks pemikiran Herbert Feith kelima kelompok itu beraliran tradisionalisme Jawa, Islam, dan nasionalisme radikal. Aliran ini cermin dari kekuatan politik masyarakat.

Aristokrat protagonis masuk SI adalah wujud perubahan orientasi politik menuju politik partisipasi massa. Sementara itu SI mengutamakan perhatian pada

kesatuan dan persatuan umat Muslim, serta kesampingkan kontroversi mengenai aliran dalam Islam [Islam Jawa dan Islam syariat]. Faktor ini yang memacu aristokrat protagonis memasuki SI. Pada sisi lain jurnalis berperan pembangkit opini dan mobilitas politik. Kelompok intelektual dan pengusaha Muslim berperan mengelola keberlangsungan organisasi, sedangkan masyarakat kota dan desa pendukung organisasi. Dukungan mereka tergantung pada keberpihakan dan usaha SI dalam memacu mobilitas vertikal.

Kelompok intelektual pendukung SI adalah tokoh dan masyarakat Muslim. Di Surakarta SI didukung Pesantren Jamsaren, Madrasah Mambaul Ulum (1905), dan Madrasah Arabiyah Islamiyah (1909). Keterlibatan PB X dalam organisasi politik merupakan identifikasi diri atau orientasi sikap politik. Pengertian orientasi politik adalah: (1) adanya kepercayaan terhadap politisi; (2) secara psikologis menaruh sikap toleran terhadap partai politik; (3) orientasi dipersepsikan akan membangkitkan basis massa yang lebih luas; (4) orientasi dapat mendorong terjadinya integrasi politik; dan (5) orientasi politik bisa memicu konflik politik, bila diartikulasikan sebagai perjuangan antar politisi untuk meraih dan memperebutkan basis massa, baik yang belum dikuasai maupun yang sudah dikuasai.

Sikap politik mendorong penentuan orientasi politik. Gejala ini yang memacu tumbuhnya politik aliran pada masa pergerakan bangsa. Konsistensi PB X terhadap orientasi politik dapat dilihat dari usaha-usaha Sunan untuk menata struktur sosial masyarakat melalui pemberdayaan pendidikan dan ekonomi pribumi, bahkan dia rela melindungi organisasi sosial dan politik dari 'sengatan' para pejabat Belanda di Surakarta. Dalam kunjungan ke daerah PB X dianggap masyarakat setempat sebagai pendiri SI dan pendukung BO. Kunjungan itu menjadi ajang kampanye terselubung untuk memberi dukungan terhadap organisasi politik.

Dalam hubungannya dengan sistem beamtenstaat, tentu perjalanan incognito, dapat berpeluang membuka 'isolasi politik' kawasan pedesaan, karena: (1) Di setiap persinggahan Sunan dielu-elukan masyarakat setempat. (2) Sunan berusaha menjalin komunikasi dengan tokoh setempat, serta memberi cinderamata. Komunikasi dan cinderamata adalah bentuk persahabatan yang multi tafsir. (3) Stigma yang melekat dalam diri Sunan adalah pendiri SI, dan hal ini diyakini oleh masyarakat setempat. Gambaran itu menunjukkan Sunan adalah elit politik yang disegani oleh berbagai lapisan masyarakat.

C. Paku Buwana X dan Insulinde

Orientasi sikap politik Sunan terhadap BO dan SI tidak hanya mencitrakan integrasi politik, tetapi dapat memicu konflik antar aliran dalam bingkai pergerakan kebangsaan. Konflik identik dengan relasi konfrontatif karena perbedaan persepsi, sikap, dan tindakan politik. Awal pergerakan, relasi konfrontatif antara kelompok moderat dan garis keras menonjol, terutama antara Tjipto Mangoenkoesoemo dan PB X.

Konfrontasi itu adalah citra tidak percaya terhadap kemampuan elit keraton. Bahkan Tjipto Mangoenkoesoemo memandang elit keraton tidak mampu melepaskan budaya otoriter, serta tidak dapat memahami budaya demokrasi. Pada saat kekuasaan mereka 'diamputasi' oleh pemerintah Belanda, mereka terkejut, dan membangun simbolisme kekuasaan di atas perangkat budaya keraton yang 'rumit dan megah'. Kenyataan ini ditafsirkan kesulitan elit melepaskan 'tradisionalisme', dan tidak mampu menerima 'kemodernan' yang lengkap dengan pemikiran 'keindonesiaan'.

Tjipto Mangoenkoesoemo, Muhammad Misbach, dan Mas Marco Kartodirjo tidak nyaman terhadap kiprah politik PB X dan kerabat keraton. Hal ini justru memperluas relasi konfrontatif antar mereka. Landasan gerakan Islam yang dilancarkan Sunan mencitrakan paradigma kooperatif, yang dijadikan sasaran kritik serta provokasi, baik di surat kabar maupun rapat umum. Elit

keraton dipandang sebagai elit yang lemah dan tidak mampu bertindak untuk kepentingan rakyat.

Kelemahan pemikiran Tjipto Mangoenkoesoemo, Muhammad Misbach, dan Mas Marco Kartodikromo adalah tidak membedakan antara kategori aristokrat protagonis dan aristokrat status quo (pangreh praja). Aristokrat protagonis lebih banyak terlibat dalam pergerakan dengan tujuan membangun kolektivitas politik, sedangkan aristokrat status quo terayomi oleh struktur birokrasi kolonial, yang secara jelas berpihak kepada pemerintah Belanda.

Relasi konfrontatif dalam pemikiran Benedict Anderson adalah simbolisasi konflik antara golongan muda dan tua. Kerumitan konflik antara golongan muda dan tua, tidak mudah terjembatani oleh komunikasi politik, karena golongan muda menampilkan persepsi unik dalam pemikiran dan perilaku politik, terutama kecenderungan menempatkan ranah perbedaan, misalnya antara pangreh praja dan non-pangreh praja, priyayi dan non-priyayi, sekolah umum dan madrasah, laki-laki dan perempuan, serta pribumi dan non-pribumi. Perbedaan itu diciptakan, baik dalam sistem pendidikan kolonial, interaksi sosial, maupun komunikasi. Perbedaan ini berakibat terbangun struktur sosial yang memperuncing 'orang lain' (the other).

Upaya membangun struktur sosial the other ditujukan untuk melindungi modal usaha kolonial yang sudah tertanam dalam industri perkebunan, eksplorasi (perminyakan dan pertambangan), serta industri pabrikaan. Ada dua akibat yang ditimbulkan dari bangunan struktur sosial the other, yaitu:

- (1) Kelas menengah pribumi cenderung mengikuti arus budaya Barat, baik berkaitan gaya hidup maupun cara berpikir mereka, sehingga sikap mereka ditafsirkan Belanda sebagai moderat dan kooperatif. Tampilan kemodernan itu adalah simbol keunggulan peradaban Barat dalam tata ruang kehidupan masyarakat pribumi.
- (2) Struktur sosial the other memperuncing 'segregasi politik'. Kekuatan politik terpecah dalam aliran, dan tak akan tercipta kolektivitas politik. Tidak adanya sinergi antar partai maka kekuatan pribumi berada di pinggiran, dan sulit menghadapi kekuatan dominan (negara kolonial). Konsekuensi lemahnya sinergi adalah meluasnya provokasi elit terhadap masyarakat pedesaan. Dalam sistem politik beamtenstaat, pedesaan adalah daerah massa mengambang (floating mass) yang tidak boleh dijamah kegiatan politik. Provokasi terhadap masyarakat pedesaan merugikan, karena basis kekuatan partai lemah, sehingga pemimpin partai akan terkena pasal hukum kolonial, "mengganggu ketertiban dan keamanan".

Relasi konfrontatif justru memacu ketegangan politik di Surakarta. Pada Juli 1919, Samanhoedi dan Martodharsono mengundang wakil-wakil masyarakat Surakarta (pengusaha dan pedagang batik, jurnalis, dan elit keraton) untuk membicarakan provokasi Tjipto Mangoenkoesoemo. Mereka membentuk Komite Keselamatan Rakyat Surakarta (Comite Rahayat Vorstenlanden). Komite ingin mempertahankan kewibawaan raja dan otonomi Surakarta. Keanggotaan komite meliputi kelompok sosial dalam masyarakat, baik partai politik (SI) maupun Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM). Gejala ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap gerakan Sunan sangat besar, dan dukungan SI dan BO terhadap Sunan justru menunjukkan indikasi tingginya pemikiran keberagaman dalam dinamika politik pergerakan. Namun, dukungan itu cermin dari struktur budaya lokal yang: (1) menghormati eksistensi elit keraton, (2) psikologi masyarakat yang menghargai perubahan politik di Kasunanan, dan (3) penghargaan masyarakat terhadap kebijakan Sunan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Tjipto mencela pemikiran Sunan, BO, dan SI yang mengikuti garis politik etis. Konfigurasi politik etis dipandang PB X paling ideal dalam konteks sistem beamtenstaat, karena sistem itu "a politik" yang menekan pertumbuhan

nasionalisme. Pada sisi lain, pemikiran Tjipto Mangoen-koesoemo beserta Insulinde/NIP-SH menghendaki adanya proses evolusi yang sehat dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan demikian pemikiran politik Tjipto dan PB X berada dalam bingkai yang sama, yakni kedaulatan bangsa, meskipun sifat perjuangan berbeda, yakni secara kooperatif dan non-kooperatif.

Relasi konfrontatif menunjukkan rendahnya civic engagement dan political engagement antar kelompok dalam politik pergerakan. Hal ini membawa konsekuensi rentannya sikap toleransi dan sikap percaya terhadap lembaga politik. Rentannya toleransi terhadap lembaga politik merupakan karakter pergerakan tahun 1920-an. Karakter itu: (1) Elit politik cenderung mudah melakukan konsolidasi yang diwujudkan pembentukan organisasi politik yang beraliran tradisionalisme Jawa, Islam, dan nasionalisme. Ketiga aliran itu belum bersinergi dan menjadi kekuatan politik di Surakarta. (2) Elit politik belum dapat menerima pemikiran keberagaman dalam dinamika politik pergerakan, khususnya aliran-aliran politik sosialisme dan marxisme. (3) Mudah timbul friksi antar elit politik, sehingga keberlangsungan suatu partai politik tidak terlalu lama. (4) Friksi antar elit politik berakibat program unggulan partai sulit untuk diwujudkan.

Dukungan PB X terhadap BO dan SI adalah konsistensi mempertahankan aliran tradisionalisme Jawa dan Islam sebagai pilar politik Kasunanan. Pilar politik itu dibangun mengikuti pemikiran politik Sultan Agung, dan dibangkitkan kembali pada dasawarsa kedua abad XX untuk memacu dinamika politik di Surakarta. Sunan beranggapan bahwa menyatunya dua aliran dalam pilar politik pergerakan dapat menyatukan kekuatan rakyat, baik dalam pembentukan kekuatan (machtsvorming) maupun menggerakkan kekuatan (machtsaanwendings).

Ada dua hal yang dapat dicermati dari pemikiran Sunan, yaitu: (1) aliran politik tradisionalisme Jawa dan Islam dimungkinkan bersinergi dengan aliran nasionalisme radikal; (2) aliran politik yang bersinergi bernaung dan menjadi kekuatan politik yang tercermin dalam SI dan BO; (3) adanya sinergi kekuatan itu dapat menekan beamtenstaat. Politik beamtenstaat merupakan cermin negara kuat, mengakibatkan seluruh saluran ekonomi dan politik dikuasai oleh kelompok sosial dan politik yang dekat dengan penguasa kolonial. Pada sisi lain, mobilitas vertikal tidak berkembang, dan partisipasi politik masyarakat disumbat oleh kekuatan negara. Dengan demikian negara kolonial telah memerankan diri sebagai pemerintahan teror, dan ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi maupun politik justru mudah dibangkitkan menjadi gerakan perlawanan rakyat.

D. Kesadaran Politik Kerabat Keraton

Awal gerakan politik PB X sudah mencitrakan Islam dan Jawa, sehingga konsekuensi dari pemikiran itu adalah kesediaan melakukan konversi politik dari politik tradisional menuju politik partisipasi massa. Artinya, elit istana (baik putera, menantu, maupun kerabat) siap terjun dalam dunia politik praktis. Partisipasi elit istana dalam SI dan BO menimbulkan relasi konfrontatif dengan kelompok nasionalis garis keras, yaitu Tjipto Mangoenkoesoemo, Muhammad Misbach, dan Mas Marco Kartodikromo. Relasi konfrontasi memacu tumbuhnya dinamika politik, khususnya terbentuk polarisasi politik, baik organisasi politik berwacana kooperatif maupun non-kooperatif.

Pada awal abad XX, anak-anak sentana dan abdi dalem telah menyelesaikan pendidikan tinggi, dan terpacu memasuki dunia politik praktis yang berorientasi pada pemikiran politik PB X. Hal ini dilatarbelakangi: (1) mereka dekat dengan putera PB X; (2) anak-anak sentana dan abdi dalem yang memperoleh beasiswa rijksstudiefond melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi; (3) anak-anak sentana dan abdi dalem tersebut memiliki jejaring politik dalam skala nasional, dan jejaring politik itu digunakan untuk membangun interaksi, komunikasi, dan partisipasi dalam organisasi politik atau partai politik.

Anak-anak yang memperoleh beasiswa adalah: Prof. Dr. Mr. Soepomo, dr. Radjiman Widiadinigrat, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Prof. Dr. Poerbatjaraka,

Prof. Dr. Mr. Wiryono Prodjodikoro, Prof. Dr. Mr. Notonagoro, Mayor Jenderal Polisi Domo Pranoto. Pengantar disertasi Poerbatjaraka yang dipertahankan di Universitas Leiden (1926), disampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Sri Paduka Susuhunan PB X. Lebih lanjut Poerbatjaraka mengemukakan:

“Sri Paduka Susuhunan Pakubuwana X di Surakarta yang telah menyekolahkan saya di Sekolah Eropa [Europesche Lagere School, ELS] di Sala bersama dengan putera-puteranya sendiri. Andaikan ini tidak terjadi, tentu saya tidak akan pernah berkemampuan membuat ...[disertasi] ini, karena saya tentu tidak akan bisa berbahasa Belanda.”

Sebelum elit istana terjun dalam politik praktis, mereka mengasah keterampilan pada Perkumpulan Abipraya (1904) dan Narendra Putra (1908). Dalam perkembangannya, Narendra Putra berubah menjadi Narpawandawa. Yang dimaksud Perkumpulan Abipraya adalah organisasi priyayi pegawai keraton, sedangkan Narpawandawa adalah organisasi para bangsawan keturunan raja Kasunanan. Para priyayi yang tergabung dalam organisasi itu menyadari bahwa masyarakat Surakarta harus dimajukan kehidupan mereka, dan ekspresi pemikiran ini ditafsirkan sebagai ‘kesadaran diri’.

Pertemuan antara Abipraya dan Tirtoadhisoejo, pada 1904, Tirtoadhisoejo mengemukakan pandangan: (1) meminta anggota Abipraya memposisikan sebagai patron pengusaha dan pedagang batik; (2) memasuki abad XX, anggota Abipraya harus berperan dalam organisasi yang bergerak dalam bidang politik maupun ekonomi, karena mereka adalah: (a) tokoh yang pernah mengenyam pendidikan Barat; (b) elit adalah kelompok sosial yang mudah merekrut kekuatan massa; dan (c) mereka adalah kelompok sosial yang mampu membangkitkan perlawanan politik rakyat terhadap kekuasaan kolonial.

Pertemuan itu memacu elit istana terjun dalam dunia politik praktis. Hal ini dapat diamati dari keikutsertaan P. Hangabehi (putra mahkota) dan RMA. Woerjaningrat (menantu) dalam kepengurusan SI (1912) dan BO (1916). Bahkan P. Hangabehi menjadi pelindung Centraal Comite SI, dan RMA. Woerjaningrat menjadi Ketua BO Cabang Surakarta, sedangkan kerabat banyak yang menjadi anggota SI. Kerabat istana yang menjadi anggota SI adalah RMA. Poespodiningrat (Bupati Nayoko), KRT. Wiryodiningrat (putra dari penasihat Sunan), dan Soerjodiningrat (menantu dan pejabat Kasunanan). Keterlibatan mereka dalam organisasi politik menimbulkan rasa khawatir Residen G.F. van Wijk (1909-1914), karena keterlibatan itu memacu bersentuhan dengan gerakan politik Islam di Surakarta.

IV. Reaksi Belanda dan Perubahan Politik Kasunanan

A. Reaksi terhadap Gerakan Politik Paku Buwana X

Sejak semula gerakan politik yang dilancarkan PB X mencitrakan gerakan Islam yang dibingkai dalam nasionalisme Jawa. Konsekuensi dari tindakan tersebut adalah kesediaan untuk melakukan konversi dari politik tradisional yang dianut menuju politik partisipasi massa. Artinya, elit politik keraton (baik putera, menantu, maupun kerabat) siap menerjuni dunia politik praktis dan tidak khawatir terhadap ‘senjata’ *exorbitante rechten* yang berfungsi untuk menegakan *rust en orde*.

Exorbitante rechten dan *rust en orde* adalah landasan yuridis pemerintah untuk meluncurkan pengurungan (*policy of containment*) terhadap tokoh pergerakan. Politik pengurungan merupakan pembatasan ruang gerak elit politik dalam organisasi kepartaian yang dipersepsikan mengganggu ketertiban dan keamanan. Dukungan dan partisipasi politik elit istana terhadap SI menuai reaksi keras dari pemerintah. Adalah logis bila pada akhirnya P. Hangabehi (putra mahkota), ketua kehormatan SI, terkena *exorbitante rechten* dan diasingkan di Negeri Belanda. Larangan elit istana menjadi anggota organisasi politik dilandasi

alasan bahwa keberadaan elit istana akan mempercepat proses penggalangan massa. Bila keberadaan elit istana bertahan di organisasi itu dikhawatirkan akan meletus konflik antara massa Islam dan pemerintah Belanda.

Fred R. von der Mehden memandang Islam merupakan kekuatan sosial dan politik, karena Islam telah melekat dalam struktur sosial maupun budaya masyarakat, sehingga gerakan yang ditampilkan tokoh Muslim mencerminkan simbol kebangsaan. Pada sisi lain Sartono Kartodirdjo melihat bahwa Islam merupakan identitas politik nasional, dan gerakan politik Islam yang dilancarkan sepanjang abad XIX hingga dasawarsa kedua abad XX ditujukan untuk melawan pemerintah kolonial di Hindia Belanda.

Sepanjang kolonialisme ada empat bentuk pengurangan terhadap institusi keraton: (1) Pengambilalihan daerah Pasisir dan Mancanegara. Kedua daerah itu dijadikan industri pertanian ekspor. (2) Membentuk birokrasi Binnelandsbestuur dan Inlandschbestuur yang dikelola 'priyayi baru', yang dipandang mampu bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Berdirinya Binnenlandsbestuur dan Inlandschbestuur telah meminggirkan birokrasi Kasunanan, sehingga birokrasi itu hanya mengurus sistem administrasi setempat. (3) Tanah lungguh milik keraton yang tidak terkena program tanam paksa dijadikan perkebunan tanaman ekspor, sehingga daerah kekuasaan raja menyempit. (4) Melarang elit istana terjun dalam kegiatan politik.

Politik pengurangan yang berlangsung dalam kurun waktu lama berakibat aristokrat Jawa terpilah menjadi dua kelompok, yakni aristokrat protagonis dan status quo. Keterpilahan menimbulkan perbedaan sikap dan orientasi politik. Aristokrat protagonis mendukung politik pergerakan kebangsaan. Mereka membangun jejaring politik dengan ulama, intelektual, serta pengusaha dan pedagang Muslim. Aristokrat status quo bersikap sebaliknya, yaitu memungsikan diri sebagai 'garda depan' mendukung eksistensi pemerintah kolonial di Hindia Belanda.

Salah satu tindakan PB X melawan politik pengurangan adalah melalui kunjungan ke daerah. Kunjungan itu dinamakan perjalanan incognito. Bahasa istana menyebut udik-udik dan tetirah. Perjalanan incognito dibalut dengan pemberian bantuan, cinderamata, dan gelar kerajaan kepada tokoh masyarakat serta tokoh politik, bahkan Sunan menginap di daerah itu untuk menghormati pejabat setempat. Menurut Kuntowijoyo, perjalanan incognito adalah bagian dari politik simbolis, karena politik yang dimainkan PB X sejak tahun 1910 [sic.] bermakna sosial serta menggugah nasionalisme Jawa. Karena itu, Sunan lebih piawai dalam memainkan politik simbolis dari pada Residen Surakarta.

Perjalanan incognito mengandung unsur penyamaran dan nuansa politis yang ditujukan untuk menampilkan kebesaran PB X. Daerah yang dikunjungi yakni: Yogyakarta, Magelang, Temanggung, Purbalingga, Ambarawa, Salatiga, Semarang, Demak, Pekalongan, Kutoarjo, Cepu, Maos, Cilacap, Banyumas, Purwokerto, Madiun, Kediri, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Madura, Malang, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Batavia, Banten, Bogor, Lampung-Sumatera Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Banyaknya tempat yang dikunjungi dan dalam konteks sistem beamtenstaat dan dactyloscopy (sidik jari) yang merupakan teropong pemerintah Belanda yang ditujukan untuk mengawasi gerak gerik orang yang dicurigai, maka perjalanan incognito mencitrakan raja yang memiliki kebebasan dan kemandirian. Berpijak pada sistem beamtenstaat dan sistem dactyloscopy maka perjalanan dengan rombongan besar dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Kedatangan Sunan di suatu daerah dapat memacu kerumunan massa, karena adanya keinginan masyarakat untuk melihat rombongan raja. Munculnya kerumunan memungkinkan tumbuhnya 'dialog' antar orang yang berkerumun. Dalam perspektif pemikiran Islam kerumunan massa merefleksikan kebebasan yang seharusnya dimiliki setiap warga masyarakat. Mereka mulai memikirkan

tentang self-reliance (kemandirian), self-sufficiency (swa-sembada), self defence (swa-pertahanan), serta kreativitas masyarakat Islam dalam usaha dan perdagangan.

Beamtenstaat dan dactyloscopy bila ditempatkan pada pemikiran Vilfredo Pareto menunjukkan bahwa Belanda tidak mampu menahan gerakan politik keagamaan meskipun telah dilakukan pengawasan secara ketat, baik tingkat lokal maupun pusat. Pada dasarnya gerakan politik keagamaan meningkatkan kualitas politik Muslim, karena memacu mereka berkomunikasi menghadapi kenyataan sosial-ekonomi maupun sosial-politik. Komunikasi dan tukar pikiran adalah pencerahan yang mereproduksi self-image (citra diri), dan membuka cakrawala naahd□ah (kebangkitan) untuk menghadapi kolonialisme Belanda yang memicu terjadinya kemiskinan struktural.

Berpijak pada perjalanan incognito, secara simbolik terkandung keinginan menyatukan kelas sosial yang ada dalam kerumunan menjadi sebuah kekuatan politik berbingkai SI dan BO. Tindakan ini yang paling rasional yang dapat dicapai, karena PB X mustahil menjadi pengurus ataupun anggota organisasi politik. Masyarakat paternalistik akan selalu mengikuti bingkai sang patron (raja). Artinya, citra politik patron dapat memacu rakyat untuk mengikuti orientasi-orientasi politik tersebut.

Tidak mengherankan bila perjalanan incognito menimbulkan ketegangan antara PB X dan pejabat Belanda di Surakarta. Pada masa Residen W. de Vogel (1897-1905) perjalanan Sunan ke Semarang diizinkan membawa rombongan sekitar 200 orang. Sebaliknya, pada masa Residen G.F. van Wijk (1909-1914) rombongan dibatasi 36 orang, dan kunjungan ke Buitenzorg [Bogor] pada tahun 1922 diperkecil lagi menjadi 15 orang.

Pengurangan jumlah rombongan merupakan strategi kolonial untuk menjaga sistem beamtenstaat yang apolitik. Maksudnya, Belanda tidak ingin muncul kekuatan politik dalam masyarakat. Perjalanan incognito dalam jumlah besar, dipersepsikan akan memacu terbentuknya kelompok politik, serta tumbuhnya ruang 'dialog politik' dalam masyarakat yang terfokus pada persoalan sosial-ekonomi serta sosial-politik. Kekhawatiran itu yang mendorong pemerintah membatasi jumlah perjalanan dan jumlah anggota rombongan.

B. Hilangnya Arah Politik Elit Kasunanan

Gejala disorientasi politik di istana sudah tampak sejak kesehatan PB X merosot. Putera mahkota sepulang dari pengasingan tidak lagi terjun dalam bidang politik. Pada sisi lain, PB X sejak berusia 32 tahun sudah mengidap penyakit ginjal, dan tidak berusaha menekuni hidup sehat, sehingga penyakit yang diidapnya makin menggerogoti organ tubuhnya. Menginjak usia 70 tahun, Sunan tidak melakukan kegiatan politik. Dia dalam perawatan dokter pribadi R. Moehammad Saleh, serta dokter-dokter Belanda, Prof. Dr. Siegenbeek van Heukelom, dan Dr. Block di pesanggrahan Paras, Boyolali, hingga wafat pada tanggal 20 Februari 1939, jam 07.30.

Ada tiga persoalan yang memacu disorientasi politik, yakni:

- (1) Sejak tahun 1936 kesehatan Sunan makin menurun, tekanan kolonial dan kaum nasionalis garis keras menyudutkan peran politik elit istana, sehingga faksi P. Hangabehi cenderung berpihak ataupun berlandung dibalik kekuatan kolonial Belanda.
- (2) P. Hangabehi (putra mahkota), tidak memiliki visi dan misi politik. Keterlibatan P. Hangabehi dalam dunia politik hanya didorong oleh P. Hadiwidjojo dan RMA. Woerjaningrat. Persepsi Residen A.J.W. Harloff (1918-1922) bahwa putera mahkota adalah sosok aristokrat yang tidak mempunyai visi politik. Pemikiran ini selaras dengan pandangan Hoesein Djajadiningrat, bahwa hampir semua elit istana tidak memiliki visi dan misi politik, kecuali Koesoemojoedo dan Soerjohamidjojo yang memahami politik lokal Surakarta.

Partisipas Koesoemojoedo, Soerjohamidjojo, dan Woerjaningrat [menantu Sunan] memacu Residen Harloff melakukan tindakan provokatif. Mereka dituduh melakukan gerakan melawan pemerintah kolonial. Kepiawaian mereka berpolitik memaksa pemerintah memilih P. Hangabehi sebagai putera mahkota, yang sama sekali tidak bervisi, patuh, tunduk, dan berserah diri kepada pemerintah kolonial.

Menurut Larson, sejak awal PB X tidak menhendaki pengangkatan P. Hangabehi sebagai putera mahkota, dan cenderung memilih Koesoemojoedo. Pada sisi lain, Van Wijk dan Sollewijn Gelpke melihat Koesoemojoedo sulit dipahami, dan pemikiran politiknya berpaham sosialisme. Kepiawaian Koesoemojoedo dalam bidang politik menumbuhkan rasa tertarik Sunan kepadanya. Perhatian ini justru memicu persaingan internal dan friksi politik di dalam istana yang mempengaruhi perkembangan politik lokal Surakarta.

Sementara itu, ikatan dan sinergi politik yang dirintis Sunan menjadi tidak berarti, karena persaingan antar elit istana memacu timbulnya faksi-faksi yang melemahkan peran politik Kasunanan. Menurut Clifford Geertz munculnya faksi politik merupakan kendala serius terhadap politik sipil yang diproyeksikan untuk meraih 'kesepadanan' antara pribumi dan bangsa Barat [Belanda].

- (3) Pada 1915, Residen F.P. Sollewijn Gelpke memutuskan menunjuk RA. Djojonagoro sebagai patih menggantikan RAA. Sosrodiningrat (1889-1915). Sebelum menduduki jabatan patih, RAA. Djojonagoro adalah Bupati Nayoko, dan dia adalah putera RAA. Sosrodiningrat. Penunjukan secara sepihak menimbulkan ketidakpuasan kerabat istana, karena peran Djojonagoro tidak sebanding Koesoemojoedo, Soerjohamidjojo dan Woerjaningrat. Mereka bertiga sangat aktif dalam politik pergerakan, sebaliknya pejabat Belanda memandang mereka adalah sosok yang licik dan berambisi.

Penunjukan Djojonagoro memungkinkan pemerintah melanjutkan praktek politik yang menempatkan birokrasi kepatihan dalam bayang-bayang kolonial, dan praktek semacam ini mempermudah pemerintah kolonial melakukan pengawasan terhadap gerakan perlawanan. Pada sisi lain, Larson berpendapat bahwa pejabat kepatihan yang dipilih pemerintah adalah pejabat berkepribadian lemah yang diharapkan menjembatani kepentingan kolonial, dan mengabaikan kepentingan keraton maupun rakyat.

Pendirian madrasah dan sekolah umum, pembangunan pasar, perbankan, dan rumah sakit adalah "sinergi asosiasi" antara PB X dan ulama, intelektual, maupun pelaku ekonomi. Sinergi itu tidak untuk mengembalikan kekuasaan geopolitik, tetapi berusaha merekonstruksi 'batin' kemanusiaan untuk memacu mobilitas masyarakat. Sinergi antar mereka secara struktural membuka peluang politik, dan pada sisi lain menjadi tindakan dekonstruksi terhadap paradigma tradisional yang dianut, sekaligus memacu tumbuhnya politik partisipasi massa.

Pendirian madrasah dan sekolah umum juga mendorong kekuatan nilai keislaman yang pada dekade berikutnya menjadi landasan orientasi politik. Mereka menarik legitimasi politik yang pernah dilakukan, dan secara terbuka melakukan gerakan perlawanan. Pemberdayaan kelas menengah dan bawah dalam bidang pendidikan dan ketrampilan-ketrampilan yang berkaitan dengan peningkatan kehidupan masyarakat berimbas pada pemberian legitimasi terhadap elit istana yang berkiprah dalam masyarakat. Peluang-peluang yang dibangkitkan Sunan adalah bersinggungan dengan kebijakan etis dan Undang-Undang Desentralisasi 1903. kebijakan kolonial itu merupakan struktur yuridis yang terbuka terhadap peluang politik. Dengan demikian peluang-peluang yang dibangkitkan Sunan memacu tumbuhnya struktur peluang ekonomi dan peluang politik, serta tumbuhnya persinggungan politik dengan pemerintah kolonial. Tahap akhir ini tumbuh tuntutan kesepadanan politik dalam masyarakat.

Perubahan tragis terjadi setelah PB X wafat, karena penggantinya (PB XI dan PB XII) tidak mampu melanjutkan struktur peluang politik maupun ekonomi. PB XI (1939-1944) lebih suka menahan diri, dan tunduk kepada tentara pendudukan Jepang. Sementara itu, PB XII (1944-2005) terperosok pada kesalahan diplomasi sepanjang masa revolusi kemerdekaan. Kedua raja tidak mampu melakukan sinergi asosiasif, sehingga muncul kemacetan kesinambungan politik antar elit istana dan tokoh politik pergerakan kebangsaan. Agaknya, visi politik mereka adalah semu dan sesaat, serta tidak berusaha menciptakan keselarasan politik.

Visi politik PB XI dan PB XII justru menimbulkan sinergi negatif dengan tokoh pergerakan, baik di dalam istana maupun di luar istana. Keterlibatan putera dan menantu, Koesoemojoedo, Soerjomihardjo, dan Woerjaningrat, dalam politik pergerakan ditafsirkan PB XII sebagai kegiatan pribadi. Ketiga aristokrat itu aktif dalam organisasi politik, yakni SI, BO, Politiek Economische Bond (PEB), Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), Jong Java, Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), dan Partai Indonesia Raya (Parindra).

Berdasarkan hasil penelitian diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kebijakan akses pendidikan dan ekonomi untuk pribumi memacu terbangunnya peluang struktur ekonomi dan politik. Peluang-peluang itu yang membangkitkan politik lokal, bahkan pada pasca proklamasi kemerdekaan diakui beresonansi "nasional".
2. Penggalan peristiwa-peristiwa lokal sejarah Indonesia harus didorong terus menerus, karena peristiwa lokal yang memacu tumbuhnya peristiwa nasional. Historiografi Indonesia dalam pandangan Hans van Miert dan Umar Khayam belum sempurna.
3. Konstruksi sejarah Indonesia yang disajikan dalam buku-buku teks sejarah berpusat pada penampilan peristiwa nasional, dan belum menempatkan peristiwa lokal menjadi muatan lokal pembelajaran sejarah. Pengungkapan peristiwa lokal yang berjaln dengan peristiwa nasional membangkitkan kesadaran dan kearifan bahwa kawasan lokal itu berperan dalam proses kemerdekaan bangsa.
4. Kajian mengenai sejarah Islam di Indonesia perlu dikembangkan secara mendalam, karena sumber-sumber berbahasa lokal dan asing sangat kaya.